

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG NOMADEN

ALIMITRO

ABSTRAK

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional dan banyak menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya, lebih jauh lagi gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang besar terhadap masyarakat golongan menengah kebawah dimana para golongan ini mempunyai segala aspek yang serba terbatas biasanya mereka mempunyai kegiatan seperti usaha kecil serta para pedagang kecil. Masyarakat pendatang yang tidak dapat tertampung di sektor formal akan beralih ke sektor informal. Salah satu sektor informal yang sering dimasuki adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima (PKL) menjadi alternatif termudah untuk bertahan hidup. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil, tidak perlu keahlian khusus serta pasar yang kompetitif. Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. PKL sebagai masyarakat kelas bawah, begitu juga dengan pihak pemerintah, dianggap mengganggu ketertiban umum karena berdagang di ruang-ruang publik seperti trotoar ataupun lahan strategis yang kosong, sehingga mereka dalam berusaha di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kejar-kejaran dengan Satpol Pamong Praja (Satpol PP) atau menjadi objek penertiban petugas ketertiban. pedagang kaki lima dipandang positif bagi masyarakat yang membutuhkan keberadaannya. pedagang kaki lima sanggup memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat kelas menengah ke bawah karena harganya yang murah dan letaknya yang terjangkau, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya pedagang kaki lima. Di wilayah kelurahan Pesanggrahan terdapat para pedagang nomaden yang memiliki usaha dalam bentuk berdagang secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan bahkan pedagang nomaden ini hampir merata di wilayah Jakarta khususnya dan Jabodetabek umumnya. Para pedagang nomaden dapat kembali ke tempat semula kapan saja mereka menghendaki. Pedagang nomaden melalui koordinator dalam pengelolaan dan perizinan melibatkan beberapa elemen diantaranya adalah pihak pemerintah terbawah dalam sistem birokrasi yaitu Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW) dan pihak kepolisian. Kerjasama juga terjalin erat dengan masyarakat setempat melalui organisasi massa seperti Forum Keluarga Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempuk (FBR), Pemuda Pancasila (PP), dan lain sebagainya. Sinergi antara pihak pemerintahan, masyarakat, dan ormas maka keberadaan pedagang nomaden dapat diterima kehadirannya, sehingga pihak konsumen menantikan kehadiran pedagang nomaden tersebut.

Kata Kunci: Pedagang kaki lima (PKL), Satpol Pamong Praja (Satpol PP), pedagang nomaden

ABSTRACT

monetary turmoil that occurred in Indonesia since mid-1997, has an impact that is not favorable towards the national economic life and cause a lot of great hardship among the business community to continue kegiatannya, further turmoil has also given a great influence on society middle and lower class where the group has a very limited aspect they usually have activities such as small businesses and small traders. Immigrant communities that can not be accommodated in the formal sector to the informal sector will switch. One of the informal sector are often entered are street vendors. Street vendors (PKL) be the easiest alternative for survival. This is in accordance with the characteristics of the informal sector that is easily accessible,

flexible in time and place, depending on local resources and the relatively small scale of business, do not need special skills as well as the competitive market. Kali traders (vendors) are often viewed negatively by some people. PKL as the lower social classes, as well as the government, are considered mengganggu public order due to trade in public spaces such as sidewalks or strategic land empty, so that they are in business in the jurisdiction of the State Unitary Republic of Indonesia must chase Satpol Civil Service (municipal police) or be the object of enforcement officers ketertiban. pedagang pavement was seen as positive for the people who need keberadaannya. pedagang pavement able to meet the needs for public goods and services to lower middle class because the price is cheap and the location is affordable, so people felt helped in the presence of street vendors. in the village there Pesanggrahan nomadic traders who have business in the form of trade is moving from one place to another and even nomadic traders have almost uniformly in the region, especially Jakarta and Jabodetabek general. Nomadic Traders can back into place anytime they want. Nomadic traders through the management and licensing coordinator involve some element of which is the bottom of the bureaucratic system of government, namely the Neighborhood (RT) and Rukun Warga (RW) and the police. Cooperation is also interwoven with the local community through mass organizations such as Betawi Family Forum (Forkabi), Forums Betawi Rempuk (FBR), Pemuda Pancasila (PP), and so forth. The synergy between the government, communities, and organizations the presence of nomadic traders acceptable presence, so that consumers look forward to welcoming tersebut nomadic traders.

Key Word : Street vendors (PKL), Civil Service (municipal police), nomadic traders

LATAR BELAKANG

Pedagang Kali Lima (PKL) sering dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. PKL sebagai masyarakat kelas bawah, begitu juga dengan pihak pemerintah, dianggap mengganggu ketertiban umum karena berdagang di ruang-ruang publik seperti trotoar ataupun lahan strategis yang kosong, sehingga mereka dalam berusaha di wilayah hukum Negera Kesatuan Republik Indonesia harus kejar-kejaran dengan Satpol Pamong Praja (Satpol PP) atau menjadi objek penertiban petugas ketertiban.

Pedagang kaki lima dipandang positif bagi masyarakat yang membutuhkan keberadaannya. Pedagang kaki lima sanggup memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat kelas menengah ke bawah karena harganya yang murah dan letaknya yang terjangkau, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya pedagang kaki lima.

Di wilayah kelurahan Pesanggrahan terdapat para pedagang nomaden yang memiliki usaha dalam bentuk berdagang secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan bahkan pedagang nomaden ini hampir merata di wilayah Jakarta khususnya dan Jabodetabek umumnya. Para pedagang nomaden dapat kembali ke tempat semula kapan saja mereka menghendaki.

Pedagang nomaden melalui koordinator dalam pengelolaan dan perizinan melibatkan beberapa

elemen diantaranya adalah pihak pemerintah terbawah dalam sistem birokrasi yaitu Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW) dan pihak kepolisian. Kerjasama juga terjalin erat dengan masyarakat setempat melalui organisasi massa seperti Forum Keluarga Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempuk (FBR), Pemuda Pancasila (PP), dan lain sebagainya. Sinergi antara pihak pemerintahan, masyarakat, dan ormas maka keberadaan pedagang nomaden dapat diterima kehadirannya, sehingga pihak konsumen menantikan kehadiran pedagang nomaden tersebut.

PERNYATAAN MASALAH

Hubungan pedagang nomaden dengan masyarakat dan sebaliknya, hubungan masyarakat terhadap pedagang nomaden. Dalam hal ini terutama hubungan pedagang nomaden dengan masyarakat khususnya masyarakat setempat secara sosial terjalin baik hal ini dikarenakan tingkat kesadaran yang dimiliki oleh para pedagang bahwasanya untuk memasuki suatu area yang notabenehnya kawasan orang lain harus menjaga norma-norma kesopanan serta tatakrama sehingga kehadiran mereka tidak menimbulkan gesekan antara penduduk setempat dengan para pedagang yang dianggap pendatang, namun jika ditinjau dengan sudut pandang secara ekonomis maka kehadiran para pedagang ini

memberikan keuntungan diantara kedua belah pihak yang berinteraksi, yaitu dengan adanya kehadiran para pedagang nomaden tersebut masyarakat setempat merasa diberikan keuntungan yakni dengan belanja murah, jarak tempuh yang relatif dekat dari rumah tinggal sehingga menghemat ongkos ke pasar-pasar terdekat dimana tempat yang mereka tuju untuk mendapatkan kebutuhan mereka selama ini, warga juga merasa ada hiburan dadakan untuk anak dan keluarga mereka.

Hubungan pedagang nomaden dengan organisasi massa (ormas) dan sebaliknya, hubungan ormas terhadap pedagang nomaden. Namun disamping hubungan dengan masyarakat setempat antara lain hubungan yang harus dibina para pedagang nomaden adalah hubungan dengan organisasi masyarakat seperti Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Forum Betawi Rempug (FBR) serta Pemuda Pancasila (PP), biasanya yang langsung berinteraksi dengan ormas ini adalah Panitia pelaksana Pasar dimana hubungan ini diadakan untuk saling menjaga keamanan dan ketentraman semua pihak.

Hubungan pedagang nomaden dengan lembaga RT/RW sekitarnya dan sebaliknya, hubungan lembaga RT/RW terhadap pedagang nomaden. Disamping yang telah diuraikan diatas masih ada hal yang tak kalah pentingnya yakni hubungan dengan lembaga RT/RW yang mana dalam hal ini dikenal dengan yang punya wilayah karena dalam pemerintahan pada tingkatan inilah lembaga yang langsung berinteraksi dengan masyarakatnya sehingga dengan terjalannya hubungan antara pedagang nomaden dengan lembaga ini akan semakin memperbaiki keadaan sehingga keinginan timbal balik antara pedagang nomaden dengan masyarakat dapat terpenuhi secara baik.

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara pedagang nomaden dengan masyarakat, organisasi masyarakat ?

2. Keuntungan yang diperoleh para pedagang nomaden masyarakat, lembaga RT/RW ?
3. Apa manfaat hubungan antara pedagang kaki Nomaden dengan keuntungan bagi Negara?

PENDEKATAN TEORI

Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan sebagai analisis didalam pemberdayaan dan pemerataan perekonomian dibidang sektor informal masyarakat.

1. Pedagang dan Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Damsar¹ mendefinisikan pedagang sebagai berikut: pedagang adalah orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dikemukakan Damsar (1997) membedakan pedagang menurut jalur distribusi barang yang dilakukan, yaitu:

- a. Pedagang distributor (tunggal), yaitu pedagang yang memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu.
- b. Pedagang partai (besar), yaitu pedagang yang membeli produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lainnya seperti grosir.
- c. Pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. (Yunus, 2011)

Pedagang kaki lima menurut An-nat (1983:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu

¹ Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2009), hlm. 106

dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan Ichsan Paramatya dalam Karafir² mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emperemper roko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah.

2. Pedagang Nomaden

Pedagang nomaden adalah pedagang yang melakukan aktifitas perdagangan dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lainnya secara berkala dan kembali lagi ketempat semula. Pedagang nomaden langsung berhadapan dengan konsumen dengan cara menggelar dagangan sesuai dengan lapak masing-masing yang ditetapkan sebelumnya, dan kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari. Perbedaannya dengan pedagang kaki lima adalah pedagang nomaden memiliki koordinator yang bertugas mengkoordinir para pedagang nomaden tersebut. Koordinator memiliki 3 orang petugas yang melaksanakan teknis lapangan, pengaturan lapak/tempat dan izin, dan yang melakukan pungutan ke pedagang nomaden.

3. Masyarakat

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan.

Durkheim (1951) menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang

merupakan anggota-anggotanya. Peter L. Berger juga mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya, bahwa keseluruhan kompleks terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.³

Masyarakat sekitar pedagang nomaden merupakan masyarakat yang berhubungan langsung atau yang berada di sekitar usaha para pedagang nomaden. Masyarakat ini memanfaatkan keberadaan pedagang nomaden untuk membeli kebutuhannya karena letaknya yang dekat (tidak perlu kepasar) dan harga yang lebih ekonomis. Interaksi pedagang nomaden dengan lingkungan tidak hanya sebagai penjual dan pembeli saja, tetapi juga menjadi tempat hiburan baru bagi masyarakat sekitar dan pasar malam telah menjadi objek wisata baru di tengah-tengah ramainya kota Jakarta. Masyarakat sekitar keberadaan pedagang nomaden menjadi konsumen bagi pedagang itu sendiri.

4. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat (ormas) adalah sesuatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk membentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Ormas tersebut dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan misalnya: Agama dan Sosial.

Ormas menurut UU RI No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara RI secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila⁴

Ormas yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya diantaranya: Forkabi, FBI, Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam, dan sebagainya. Ormas-ormas tersebut banyak dijumpai di Jakarta. Di daerah Pesanggrahan, ormas Forkabi memegang peranan dalam pengamanan wilayah Pesanggrahan. Forkabi

³ <http://www. . upi. edu/Mustofa Kamil>, diakses 12 April 2016, pukul 11. 00 wib

² Ichsan Pramatya, *Modal Sosial Pedagang Kaki Lima di Jalan Gambir Tanjung Pinang*, (Studi PKL. Sayur-sayuran), <http://www. jurnal. umrah. ac. id>. Diakses 12 Februari 2016, 2013, pukul 11. 00 wib. hlm. 12

merupakan wadah anak Betawi yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat Betawi dengan tidak memandang etnis.⁴

5. Lembaga RT/RW

Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau lingkungan. Rukun Warga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW yang dipilih oleh warganya. Sebuah RW terdiri atas sejumlah Rukun Tetangga. Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk Desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk berdasarkan Permendagri No. 7/1983 tentang Pembentukan RT dan RW.

Kelurahan Pesanggrahan berada dalam wilayah kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kecamatan Pesanggrahan merupakan hasil dari pemekaran wilayah Kebayoran Lama, yang terletak di sisi barat. Nama Pesanggrahan berasal dari nama sungai Pesanggrahan yang mengalir melewati wilayah kecamatan ini. Wilayah Kecamatan Pesanggrahan terdiri dari lima Kelurahan yaitu: Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulujami. Kelurahan Pesanggrahan memiliki luas 2. 10 Km², terdiri dari 3,092 Kepala Keluarga (KK), 84 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW) (www. idjakarta. com, diakses 16 Desember 2013).⁵

⁴ <http://www.radar-indo.com>, diakses 11 April 2016, pukul. 11. 00 wib.

⁵ *Op. cit.*

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Singarimbun dan Effendy⁶ salah satu metode penelitian sosial yang amat luas pengguna adalah penelitian survei. Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner. Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah mungkinnya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar. Pada umumnya yang merupakan unit analisa dalam penelitian survei adalah individu. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dan pengaruh variabel (*independent*) terhadap variabel (*dependent*)

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel bebas (*independent variables*) yaitu: pedagang nomaden.
 2. Variabel terikat (*dependen variables*) yaitu: masyarakat, ormas, lembaga pemerintah.
 3. Tempat Penelitian
- Peneliti ini dilakukan di wilayah Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Populasi yang berdomisili di wilayah Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang terdiri dari pedagang nomaden, masyarakat disekitar berdirinya pedagang, ormas dan lembaga pemerintah (RT 001/RW011 sebanyak 90 warga).

⁶ M. Singarimbun dan S. Effendy, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan. Kedelapanbelas, (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta. 2006), hlm. 25

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 55

2. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.⁸

Menurut Sugiyono, *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁹ Dengan menggunakan teknik *accidental sampling* ini, maka sampel (responden) yang akan diambil guna mendapatkan data sebanyak 90 responden di wilayah Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, data primer digunakan teknik sebagai berikut: Data primer dihimpun dengan cara memberikan kuesioner untuk diisi oleh responden dan wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Menurut Sugiyono,¹⁰ cara pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/dokumen yang dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang relevan atau terkait, seperti:
 - a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hk Asasi Manusia
 - b. Undang-Undang UKM
 - c. Undang-Undang Koperasi
2. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, umumnya dilakukan secara langsung kepada responden guna mengkonfirmasi informasi yang telah diperoleh.

⁸ *Ibid.* hlm. 55

⁹ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 129

3. Observasi

Teknik observasi memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, serta memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

4. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti apa yang akan diukur dan apa yang diharapkan oleh responden, dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dideskripsikan meliputi kondisi umum daerah penelitian, kondisi social penelitian, identitas pedagang nomaden.

1. Kondisi Umum Kelurahan Pesanggrahan

Kelurahan Pesanggrahan adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terletak dibagian Utara Kecamatan Pesanggrahan dan termasuk Wilayah pemukiman hasil dari penggabungan dari Wilayah Jawa Barat ke Wilayah DKI Jakarta, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974.

Luas Wilayah Kelurahan Petungkungan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1815 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1227 Tahun 1989 tentang Luas Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dan luas masing-masing Kecamatan dan Kelurahan Kotamadya Jakarta Selatan telah terjadi perubahan yang semula 211,29 ha menjadi 210,09 ha yang habis terbagi kedalam 8 lingkungan RW dan 82 lingkungan RT dengan batas-batas wilayah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor

1-7805/a/30/1975 tanggal 15 Desember 1975 sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Ciledug Raya/Kelurahan Petukangan Utara

Timur : dengan Kali Uangan/Kelurahan Ulujami

Selatan : dengan Kelurahan Pesanggrahan dan Desa Pondok Betung kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten

Barat : dengan Kali Sepak/Desa Cipadu, Desa Kreo, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten

Adapun sampai saat ini jumlah penduduk berdasarkan catatan yang ada pada Sub Seksi Kependudukan Kelurahan Pesanggrahan sampai Bulan September 2015 sebanyak 40.706 Jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 40. 706 Jiwa
- b. Jumlah Penduduk Laki-laki : 20. 739 Jiwa
- c. Jumlah Penduduk Perempuan : 19. 964 Jiwa
- d. Jumlah Penduduk WNA : 3 Jiwa
- e. Jumlah Kepala Keluarga : 14. 332 KK
- f. Jumlah KK Laki-laki : 11. 808 KK
- g. Jumlah KK Perempuan : 2. 524 KK
- h. Jumlah Penduduk Wajib KTP : 30. 384 Jiwa

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- c. Instruksi Gubernur Kepala daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 1999 tertanggal 19 April 1999 tentang Administrasi Kependudukan dan Keuangan;
- d. Keputusan Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 548/1990 tentang Standarisasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan DKI Jakarta;
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan DKI Jakarta berikut Penjelasannya;

- f. SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 752 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pelaporan Satuan Perangkat Organisasi di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
- g. Keputusan Gubernur No. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;
- h. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sarana dan Prasarana Fisik

Untuk membantu kelancaran pemerintahan Kelurahan, maka Kelurahan Pesanggrahan memiliki sarana dan prasarana kehidupan sebagai penunjang aktifitas-aktifitas yang dilakukan masyarakatnya, baik yang dipergunakan dalam bidang pemerintahan, transportasi, dan komunikasi, perekonomian maupun sarana dan prasarana sosial dan budaya. Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Pesanggrahan dapat diketahui sarana dan prasarana yang terbanyak di Kelurahan Pesanggrahan adalah toko, kios/warung dengan jumlah 200 atau 52,49%, kemudian yang terkecil adalah kantor Kelurahan dan gereja dengan jumlah 1 atau 0,26%. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas di Kelurahan Pesanggrahan dan penunjang kegiatan perekonomian penduduk, sedangkan untuk mendukung kelancaran komunikasi dan transportasi, penduduk Kelurahan Pesanggrahan memanfaatkan sarana transportasi dan komunikasi yang tersedia.

Sementara itu sarana transportasi masih di dominasi oleh sepeda dengan jumlah 57 buah, kemudian disusul oleh sepeda motor dengan jumlah 2. 012 buah. Hal ini disebabkan karena sepeda motor dianggap sarana transportasi yang paling efisien bagi masyarakat Kelurahan Pesanggrahan, sedangkan untuk sarana komunikasi masyarakat masih banyak memanfaatkan telepon.

4. Gambaran Umum Pedagang nomaden di Kelurahan Pesanggerahan

Perkembangan pedagang nomaden di Kelurahan Pesanggerahan dimulai semenjak masyarakat mengenal sektor informal. Sektor formal yang menuntut keahlian dan ketrampilan lebih membuat masyarakat beralih ke sektor informal dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, salah satunya menjadi pedagang nomaden. Perkembangan semakin pesat seiring permintaan yang tinggi karena untuk memasuki sektor ini tidak memerlukan ijin dalam mendirikan usaha. Tidak disediakannya lokasi penampungan untuk, menyebabkan tersebut menempati ruang publik seperti trotoar, bahu jalan. Selain itu, dikarenakan pula tidak tersedianya ruang pribadi atau harga sewa serta pajak yang relatif tinggi.

Pedagang nomaden di Kelurahan Pesanggerahan tersebar di berbagai lokasi, hal ini terjadi karena Kelurahan Pesanggerahan merupakan tempat berlokasinya pusat pusat perdagangan dan jasa, pendidikan maupun industri.

5. Jenis Dagangan Pedagang nomaden

Jenis barang dagangan di Kelurahan Pesanggerahan dapat dibagi menjadi 3 jenis dagangan yakni Makanan, Non Makanan dan Jasa Pelayanan. Beberapa jenis barang dagangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Makanan

Jenis barang dagangan yang dijual ini diantaranya warung lontong, opor, nasi tum-pang, sate, roti bakar, bubur kacang ijo dan lainnya.

b. Non makanan

Jenis dagangan yang dijual umumnya berupa koran, helm dan sebagainya.

c. Jasa pelayanan

Pedagang ini memberikan jasa kepada konsumennya berupa pelayanan tambal ban, pelayanan kunci (ahli kunci). Setiap pedagang nomaden terkadang tidak hanya menjual satu jenis dagangan saja, melainkan terkadang terdapat beberapa jenis dagangan seperti

pedagang nomaden kelontong yang menjual berbagai jenis dagangan. Jenis dagangan pedagang nomaden biasanya dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan dimana pedagang nomaden tersebut melakukan kegiatan berdagangnya. Gambaran jenis dagangan yang dijual pedagang nomaden beserta jumlah pedagangnya dapat diketahui bahwa jenis dagangan yang paling banyak mendominasi adalah jenis dagangan makanan di jalan utama dengan 20 orang (34. 58%), jalan kolektor dengan 10 orang (11,11%), jalan local dengan 15 orang (16. 66%), kemudian pedagang nomaden jenis dagangan non makanan di jalan local sebanyak 5 orang (5. 56%), selanjutnya sebanyak 15 orang (16. 66%) memberikan jasa pelayanan kepada konsumennya.

Pedagang nomaden yang berlokasi di Kelurahan Pesanggerahan mayoritas berupa warung tenda sebagai sarana fisiknya yaitu mencapai 18 pedagang nomaden, hal ini disesuaikan dengan jenis dagangannya yang mayoritas berjualan makanan. Sarana fisik lainnya yang digunakan adalah gerobak tenda, yang menggunakan sarana ini biasanya ditunjang dengan tenda untuk tempat kursinya seperti pedagang nasi kucing.

Waktu beraktivitas para ini umumnya terbagi dua sesi, yang pertama berdagang dari pagi sampai sore hari. Pedagang yang kedua merupakan yang mempunyai waktu pelayanan dari sore sampai malam hari.

Pedagang nomaden di Kelurahan Pesanggerahan paling banyak dijumpai pada sore sampai malam hari yaitu dengan jumlah pedagang nomaden berjumlah 35 orang dengan persentase 38. 89%.

6. Karakteristik Pedagang nomaden Kelurahan Pesanggerahan

Berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan peneliti dapat menjelaskan 3 faktor penting yang mempengaruhi di Kelurahan Pesanggerahan di mana masyarakat memiliki peran yang penting

dalam hal pemilihan lokasi dan variable-variabel didalamnya yang dianggap menyebabkan alasan responden bertahan dan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

a. Analisa Karakteristik Pedagang nomaden Kelurahan Pesanggerahan

Karakteristik umum meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, kepemilikan usaha, status, jumlah anak, pendidikan anak. Karakteristik responden tersebut dianggap bisa menggambarkan kondisi ekonomi yang terdapat di Kelurahan Pesanggerahan.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 43 (47,8%) oran responden adalah laki-laki, sebanyak 47 (92,2%) orang adalah perempuan.

b. Karakteristik Pedagang nomaden Kelurahan Pesanggerahan Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel 4. 6 d bawah ini, sebanyak 12 (13,3%) orang responden berusia kurang dari 20 tahun, sebanyak 36 (40%) orang responden berusia antara 21 – 25 tahun, sebanyak 24 (26,7%) orang responden berusia 26 – 30 tahun dan sebanyak 18 (20%) orang responden berusia di atas 30 tahun.

c. Karakteristik Pedagang nomaden Kelurahan Pesanggerahan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tabel 4. 7 di atas, terlihat bahwa sebanyak 28 (31,1%) orang responden memiliki pendidikan SD, sebanyak 44 (48,9%) orang responden memiliki pendidikan terakhir SMP, sebanyak 16 (17,8%) orang responden memiliki pendidikan terakhir SMA dan sebanyak 2 (2,2%) orang responden memiliki pendidikan terakhir Strata Satu (S1).

d. Karakteristik Pedagang nomaden Kelurahan Pesanggerahan Berdasarkan Status

Untuk status resonden, dari total keseluruhan data responden yang diambil sebanyak 34 (37,8%) orang responden memiliki status kawin, sebanyak 41 (45,6%) orang responden memiliki status belum kawin, dan sebanyak 15 (16,7%) responden memiliki status lain-lain.

Analisis Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Nomaden

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di analisis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisi ini didasarkan pada indikator yang telah ditentukan dari parameter teori sebagai standarpengukuran. Berdasarkan konsep dan teori yang telah dikemukakan, yaitu variabel Pedagang Nomaden (X), Masyarakat Sekitar (Y₁), Organisasi Masyarakat (Y₂) dan Lembaga RT/RW (Y₃).

Rekapitulasi mengenai hasil yang dicapai dan deskripsi dari masing masing pedagang nomaden, dimana secara deskriptif dapat ditunjukkan bahwanilai (skor) Korelasi Pedagang Nomaden dengan Masyarakat Sekitar (Y₁) adalah $r = 0,244$. Sedangkan nilai (skor) Rsquare sebesar 0,06 atau 6 persen $\{r^2 = 0,244^2 \times 100\}$. Data tersebut menunjukkanbahwamasyarakatsekitardiKelurahan Pesanggerahan memiliki peran yang rendah dalam pemberdayaan ekonomi pedagang nomaden.

Ini berarti bahwa masyarakat sekitar kurang berperan dalam memberdayakan pedagang nomaden yaitu sebesar 6% dengan demikian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya masyarakat sekitar dalam memberdayakan pedagang nomaden sebesar 94% yang dalam penelitian ini tidak diteliti.

$$Y = 29.398 + 0.140X$$

Dengan demikian nilai constanta sebesar 29.398 merupakan nilai murni variabel Masyarakat Sekitar (Y₁) tanpa dipengaruhi oleh variabel Pedagang Nomaden (X) sedangkan nilai regresi 0.140 merupakan kontribusi positif dihasilkan oleh variabel Pedagang Nomaden (X), artinya bila variabel Masyarakat Sekitar (Y₁) ditingkatkan sebesar 1 point maka akan diikuti peningkatan variabel Masyarakat Sekitar (Y₁).

1. Analisa Pedagang Nomaden terhadap Organisasi Masyarakat

Di mana secara deskriptif dapat ditunjukkan bahwa nilai (skor) Korelasi Pedagang Nomaden dengan Organisasi Masyarakat (Y₂) adalah $r = 0,294$. Sedangkan nilai (skor) Rsquare sebesar 0,087 atau 8,7 persen $\{r^2 = 0,294^2 \times 100\}$. Data tersebut

menunjukkan bahwa Organisasi Masyarakat (Y_2) di Kelurahan Pesanggerahan memiliki peran yang rendah dalam pemberdayaan ekonomi pedagang nomaden.

Ini berarti bahwa Organisasi Masyarakat (Y_2) kurang berperan dalam memberdayakan pedagang nomaden yaitu sebesar 8,7% dengan demikian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya organisasi masyarakat dalam memberdayakan pedagang nomaden sebesar 91,3% yang dalam penelitian ini tidak diteliti.

$$Y = 23.267 + 0.117X$$

Dengan demikian nilai constanta sebesar 23.267 merupakan nilai murni variabel Organisasi Masyarakat (Y_2) tanpa dipengaruhi oleh variabel Pedagang Nomaden (X) sedangkan nilai regresi 0.117 merupakan kontribusi positif dihasilkan oleh variabel Pedagang Nomaden (X), artinya bila variabel Organisasi Masyarakat (Y_2) ditingkatkan sebesar 1 point maka akan diikuti peningkatan variabel Organisasi Masyarakat (Y_2).

2. Analisa Pedagang Nomaden terhadap Lembaga RT/RW

secara deskriptif dapat ditunjukkan bahwa nilai (skor) Korelasi Pedagang Nomaden dengan Lembaga RT/RW (Y_3) adalah $r = 0,029$. Sedangkan nilai (skor) R^2 sebesar 0,001 atau 0,1 persen $\{r^2 = 0,029^2 \times 100\}$. Data tersebut menunjukkan bahwa Lembaga RT/RW (Y_3) di Kelurahan Pesanggerahan tidak memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi pedagang nomaden.

Ini berarti bahwa Lembaga RTRW (Y_3) tidak berperan dalam memberdayakan pedagang nomaden yaitu sebesar 0.01% dengan demikian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya lembaga RT/RW dalam memberdayakan pedagang nomaden sebesar 99,09% yang dalam penelitian ini tidak diteliti.

$$Y = 47.736 + 0.019X$$

Dengan demikian nilai constanta sebesar 47.736 merupakan nilai murni variabel Lembaga RT/RW (Y_3) tanpa dipengaruhi oleh variabel Pedagang Nomaden (X) sedangkan nilai regresi 0.019 merupakan

kontribusi positif dihasilkan oleh variabel Pedagang Nomaden (X), artinya bila variabel Lembaga RT/RW (Y_3) ditingkatkan sebesar 1 point maka akan diikuti peningkatan variabel Lembaga RT/RW (Y_3).

3. Hubungan Antara Peran Masyarakat dengan Pedagang Nomaden

a. Hubungan Antara Masyarakat Sekitar dengan Pedagang Nomaden

Pedagang nomaden sudah tidak asing lagi di telinga dan selalu dijumpai di perkotaan Indonesia. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-tamankota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Problem kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota menjadi sorotan yang tidak baik. Tetapi ini berjuang untuk menghidupi keluarga dan menyambung hidupnya, maka juga tidak terlepas dengan kehidupanekonomi.

Dalam segi perkembangan pedagang nomaden yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, yang mengotori pandangan mata namun juga dari segi kemasyarakatan. Profesi pedagang nomaden sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Karena pedagang nomaden dapat lebih mudah untuk dijumpai oleh masyarakat dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Dengan adanya pedagang nomaden, masyarakat dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk barang-barang eceran.

Secara umum, persepsi mahasiswa tentang keberadaan dapat dikatakan baik. Nilai skor persepsi responden tentang masyarakat sekitar dengan pedagang nomaden adalah sebesar 45,67%, artinya bahwa keberadaan sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen (masyarakat sekitar), karena beberapa hal, yaitu mudah dijangkau, harga yang murah walaupun kualitas barang seringkali kurang memuaskan. Walaupun lingkungan yang menjadi kotor, membuat macet jalan dan ketidak tertiban, memberikan penilaian yang sebaliknya, yaitu nilai tinggi merupakan nilai yang sebenarnya kurang baik. Bahwa menjadikan keadaan yang tidak tertib, membuat lingkungan menjadi kotor. Sebagaimana diungkapkan oleh sebagian responden, bahwa

kawasan kelurahan pesanggerahan yang dipilih biasanya merupakan area kota yang mempunyai aktivitas ekonomi sangat produktif. Menurutny, penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang nomaden antara lain :

- 1) Adanya aglomerasi kegiatan dan kumpulan orang yang melakukan kegiatanbersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari
- 2) Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar
- 3) Adanya kemudahan interaksi antara dengan calon pembeli, meski dalam ruang yang sangat terbatas
- 4) Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum Lingkungan kelurahan Pesanggerahan merupakan tempat yang sangat produktif, di mana masyarakat sekitar seringkali membutuhkan banyak barang tanpa mempertanyakan kualitasnya. Lingkungan kelurahan telah menjadi pusat perekonomian yang terbentuk karena adanya aktifitas masyarakat di sekitarnya. Hal ini mendasari berkumpulnya para pelaku di wilayah tersebut. Keberadaan sebenarnya sangat membantu, terutama karena latar belakang perekonomian yang beragam. Hanya saja, kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan perlu ditindaklanjuti lebih jauh.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa adanya hubungan antara masyarakat sekitar dengan pedagang nomaden di Kelurahan Pesanggerahan.

b. Hubungan Antara Organisasi Masyarakat dengan Pedagang Nomaden

Peran organisasi masyarakat dalam mengorganisir pedagang nomaden dengan cara proses untuk berbagai tindakan dari penentuan masalah sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan. Dengan adanya visi misi organisasi, maka akan dapat memanager pengelolaan Pedagang nomaden dalam mencapai tujuan yang akan dicapai, seperti:

- 1) Mengidentifikasi masalah dan penentuan kebutuhan Pedagang kaki lima
- 2) Membangun kesadaran masyarakat
- 3) Menjadikan pusat pengembangan ekonomi bagi masyarakat.
- 4) Mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kelurahan pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksanya masyarakat adil dan makmur
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang nomaden
- 6) Mendorong dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan
- 7) Berperan sebagai kelompok masyarakat yang membangun dan menciptakan perekonomian bernilai tinggi pada sektor informal dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan usaha mereka
- 8) Membangun kemandirian pedagang nomaden dalam berbagai bidang (pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya)
- 9) Mengembalikan citra bangsa dengan memberdayakan pedagang nomaden dan organisasi tersebut menjadi pusat inspirasi sebagai kegiatan.

Organisasi masyarakat pedagang nomaden memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelum adanya organisasi tersebut. Dampak dari setelah terbentuknya organisasi masyarakat pedagang nomaden Kelurahan Pesanggerahan memberikan perubahan mengenai kehidupan sosial ekonomi, khususnya pada pedagang nomaden dan umumnya bagi masyarakat sekitar.

c. Hubungan Lembaga RT/RW dengan Pedagang Nomaden

Langkah kebijakan Kelurahan Pesanggerahan dalam menempatkan lokasi usaha Pedagang nomaden hal yang tidak dipungkiri Kelurahan melibatkan lembaga RT/RW dalam pengelolaannya. Dalam hubungan dengan aktivitas Pedagang Kali lima di Kelurahan Pesanggerahan dengan timbulnya

gangguan keamanan dan ketertiban dalam pengertian yang luas adalah:

- 1) Gangguan keamanan berpotensi terjadi apabila keberadaan Pedagang nomaden tak terkendali di jalur pesertarian mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan sehingga dapat menimbulkan tidan kriminal (pencopetan) Pertumbuhan Pedagang nomaden yang sangat pesat memicu potensi konflik antar pedagang maupun dengan kelompok-kelompok preman yang mengasai berjualan.
- 2) Gangguan ketertiban sangat besar sekali selain keberadaan mereka yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya seperti mengganggu kelancaran lalu lintas dan timbulnya bangunan liar akan berakibat meluasnya perbuatan maksiat terutama pada malam hari.

Untuk menjalankan penertiban Kelurahan Pesanggerahan melibatkan RT/RW yang dalam pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian di samping menjalankan tugas sesuai dengan aturan, Lembaga RT/RW harus kreatif. Hal ini RT/RW lebih banyak mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.

KESIMPULAN

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya hubungan Pedagang Nomaden dengan masyarakat sekitar (6%), organisasi masyarakat (8,7%) dan Lembaga RT/RW hanya (0,1%) sangat rendah menjadi permasalahan yang rumit di Kelurahan Pesanggerahan. Dengan demikian rendahnya masing-masing peran Masyarakat sekitar, Organisasi Masyarakat dan lembaga RT/RW sebagai penghubung antara pemerintah dengan Pedagang Nomaden dan antara Pedagang Nomaden dengan pemerintah kurang efektif, sehingga apa

yang dikehendaki oleh pemerintah terhadap Pedagang Nomaden tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah dan sebaliknya apa yang menjadi harapan Pedagang Nnomaden akan terlaksana sesuai dengan harapan Pedagang Nomaden. Paguyuban yang membantu Pedagang Nomaden mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah Paguyuban Pedagang Nomaden Pesanggerahan tidak secara resmi menyebut diri sebagai Masyarakat sekitar, Organisasi Masyarakat atau lembaga RT/RW.

2. Kegiatan pedagang nomaden ini terbentuk suatu hubungan antara pihak kelurahan Pesanggerahan dengan Pedagang Nomaden dan antara Pedagang Nomaden dengan pemerintah sehingga apa yang dikehendaki oleh pemerintah terhadap Pedagang Nomaden akan sesuai dengan harapan pemerintah dan sebaliknya apa yang menjadi harapan pedagang nomaden akan terlaksana sesuai dengan harapan pedagang nomaden. Sebagai contoh, paguyuban selalu mengingatkan pedagang akan kebersihan dan keindahan tempat mereka berdagang, sehingga walaupun pedagang nomaden tetap terlihat indah dan rapi sesuai dengan harapan pemerintah, sedangkan harapan pedagang nomaden adalah paguyuban menjadi penghubung antara pedagang nomaden dengan pemerintah. Walaupun kawasan kelurahan Pesanggerahan itu khususnya daerah larangan untuk berjualan tetapi Pedagang nomaden tetap boleh berdagang di Kelurahan Pesanggerahan dengan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama antara Pedagang Nomaden dengan pemerintah. Salah satu hasil dari Paguyuban Pedagang Nomaden Pesanggerahan terhadap Pedagang Nomaden adalah memperjuangkan kawasan pedagang Nomaden yang semula tidak boleh untuk berjualan menjadi kawasan yang boleh untuk berjualan bagi Pedagang Nmaden, asalkan mereka mematuhi aturan Perda yakni No. 8 tahun 2007 yang isinya Pedagang Nomaden boleh berjualan tetapi mereka harus

tetap menjaga kebersihan dan ketertiban dan tidak boleh membangun tempat berjualan yang permanen, artinya selesai berjualan harus bersih dan harus mematuhi aturan jam berdagang yaitu mulai jam 18. 00 WIB sampai dengan 04. 00 WIB.

3. Hubungan dengan perekonomian negara.

Dalam penjelasan UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang nomaden) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang nomaden, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan pembangunan. kelompok pedagang nomaden mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, yaitu :

1. Meskipun selama ini Pemerintah telah melakukan berbagai macam program pemberdayaan dan bantuan bagi PKL secara umum, tetapi Pedagang Nomaden di Kelurahan Pesanggerahan belum merasakan program-program tersebut. Untuk itu sebaiknya pemerintah (1) memprogramkan pemberian bantuan permodalan (2) memberikan jaminan perlindungan (3) Memberikan pembinaan dan pengaturan usaha (4) Memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kemampuan manajerial (5) melakukan kerjasama kemitraan usaha (6) memberikan Legalisasi usaha dan izin usaha dari pemerintah dan (7) Menciptakan Perda tentang penataan Pedagang Nomaden yang menunjang iklim usaha dalam hal sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan bagi Pedagang Nomaden di Kelurahan Pesanggerahan.
2. Untuk tujuan kedua, penulis menyarankan ; (1) Komunikasi antara masyarakat sekitar, organsiasi masyarakat dan lembaga RT/RW Kelurahan Pesanggerahan dan Pedagang Nomaden yang masih belum baik dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, dengan mengadakan kegiatan bersama agar terjalin hubungan baik antara pemerintah dan Pedagang Nomaden, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh Pedagang Nomaden. (2) Konsisten dalam program pemberantasan premanisme.
3. Sering diadakannya sosialisasi dan pembinaan kepada Pedagang Nomaden tentang peraturan yang terkait dengan program penataan Pedagang Nomaden, dan komunikasi yang baik antara masyarakat sekitar, organisasi masyarakat dan lembaga RT/RW sehingga sedikit demi sedikit akan tumbuh kesadaran mereka terhadap peraturan.
4. Adanya penambahan modal usaha bagi Pedagang Nomaden sehingga mereka dapat memfasilitasi sarana dagang mereka. Karena modal usaha akan sangat membantu pedagang untuk mendapatkan tempat yang layak.
5. Pengadaan tempat relokasi yang strategis berada di tempat keramaian bagi Pedagang Nomaden sehingga mereka tidak sulit untuk mendapatkan pembeli dan kembali lagi ke tempat semula.
6. Untuk menanggulangi persoalan Pedagang Nomaden dan masalah lain yang berkaitan dengan ketertiban umum sebaiknya pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang pokoknya adalah membangun kota yang berbasis masyarakat;

baik organisasi masa maupun lembaga RT/RW, di mana Produk Hukum yang cocok sebagai formulasi kebijakan Publik tersebut dan implementasinya adalah Peraturan daerah dapat menjadi sarana dalam pengaturan pedagang nomaden. Namun perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum No 8/2007 tidak menjamin Pedagang Nomaden yang berdagang di ruang publik dapat diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Isbandi Rukmana, *Intervensi Komunikasi & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Ahmadi, Abu, *Antropologi Budaya*, (Surabaya : CV Pelangi, 1996)
- Bulkis, *Manajemen Pembangunan*, (Universitas Hasanuddin, makasar)
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (GramediaPustaka Utama Jakarta,1997), hal : 979.
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (bandung : Alfabert, 2007)
- Damsar, 2009, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenata Media Group, 2009).
- Darim, Sudarman, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1994)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-13. Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Effendi, Tadjuddin Noerdin Cris Manning, *Urbanisasi, pengganggu, dan sektor Informal*. (Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1996)
- Herlianto. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. (bandung : Penerbit Alumni, 1986)
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010)
- Ihromi, Tapi Omas, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Ganda*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1990)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009)
- Machendrawaty, Nanih, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Manulang, M, *Dasar – Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Mubyarto, *Ekonomi rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Medika, 1996)
- Muslim, Azis, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakata : Teras, 2009)
- Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)
- Prijono, S. Onny dan Pranaka, A. M. W, *Pembeberdayaan : Konsep kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980)
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Singarimbun, M dan S, Effendy, *Metode Penelitian survai*, Cetakan. Kedelapan Belas, (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta. 2006)
- Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980)
- Sulistiyani, Amabar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004)
- Susilo, Agus, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima menempati bahu Jalan Kota Bogor*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2011)
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Suharto, Edi, *membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. (Bandung : PT. Retika Aditama, 2005)
- Syani, Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. (Bandar Lampung : Pustaka Jaya, 1995)
- Taniredja, T and H. Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Haji Masagung, 1990)

Widodo, Joko, *Analisis kebijakan Publik*, (Jakarta: Banyumedia, 2008)

Widjajanti, Retno, *karakteristik aktivitas Pedagang Kaki Lima* (Semarang: Fakultas Teknik UNDIP, 2006).

Internet

Ichsan Pramatya, *Modal Sosial Pedagang Kaki Lima di Jalan Gambir Tanjung Pinang*, (Studi PKL. Sayur-sayuran).

<http://www.pramatya.ac.id>. Diakses 12 Februari 2016, 2013, pukul 11.00 wib. hlm. 12

E –Jurnal Tugas akhir

<http://www.jurnal.umrah.ac.id>. Diakses 12 Februari 2016, 2013, pukul 11.00 wib. hlm. 12

Mustofa Kamil *Pendidikan luar sekolah*, <http://www.upi.edu>/Mustofa Kamil, diakses 12 April 2016, pukul 11.00 wib

Pemahaman Tentang Pedagang Nomaden <http://www.radar-indo.com>, diakses 11 April 2016, pukul 11.00 wib.

Lembaga

Kantor Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan
(Laporan Kelurahan Bulan September 2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia

UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

Instruksi Gubernur Kepala daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 1999 tertanggal 19 April 1999 tentang Administrasi Kependudukan dan Keuangan;

Keputusan Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 548/1990 tentang Standarisasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan DKI Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan DKI Jakarta berikut Penjelasannya;

SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 752 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pelaporan Satuan Perangkat Organisasi di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;

Keputusan Gubernur No. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Makalah/Artikel/Seminar

Drs. Marwan, Ir. H. Walneg S. Jas. "Pembekalan dari berbagai aspek untuk para Pedagang Nomaden" dilaksanakan di Jl. Ciputat Raya no. 44 depan Terminal Lebak Bulus. Tangsel 22 Juli 2012 .